



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI HASLINA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **635239**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.145.000.000**

1. Tanah Seluas 830 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah Seluas 20240 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, WARISAN Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 22080 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, WARISAN Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 13726.7 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
5. Tanah Seluas 13726.7 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
6. Tanah Seluas 13726.7 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
7. Tanah Seluas 13005 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 43.000.000
8. Tanah Seluas 13005 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 43.000.000
9. Tanah Seluas 13005 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 45.000.000
10. Tanah Seluas 13005 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 123.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 77.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.382.053

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.354.382.053

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.354.382.053

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.